BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTEIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Asimetri Informasi

2.1.1.1 Pengertian Asimetri Informasi

Dalam perdagangan saham di bursa efek, informasi memiliki peranan penting dalam membantu investor menentukan pilihan yang tepat dalam berinvestasi. Namun sering kali terjadi asimteri informasi yang dialami investor, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian terutama investor yang kekurangan informasi. Menurut Scott (2004:105) menyatakan :

> "Asimetri informasi (*information asymmetry*) merupakan sebuah konsep yang paling penting dalam teori akuntansi keuangan (*financial accounting theory*)".

Sedangkan menurut Beaver yang terdapat dalam jurnal Puput Tri Komalasari (2001) menyatakan bahwa :

> "Asimetri informasi adalah istilah untuk menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu investor yang *more informed* dan investor yang *less informed*."

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu kondisi ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham, dimana manajer lebih mangetahui mengenai informasi perusahaan terutama pada laporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk kepentingan pribadi,

maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemegang saham, kondisi ini akan merugikan pemegang saham.

2.1.1.2 Tipe Asimetri informasi

Dalam asimetri informasi Scott (2004:8) menyatakan bahwa ada dua tipe dari asimetri informasi, yaitu:

a. Adverse Selection

"Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties."

Berdasarkan definisi di atas, *adverse selection* ini timbul karena manajer perusahaan dan orang dalam (*insider*) lain yang mengetahui lebih banyak mengenai kondisi terkini atau prospek mendatang dari suatu perusahaan dari pada investor sebagai pihak luar.

b. Moral Hazard

"Moral hazard is a type of information asymmetry where by one or more parties to a bisiness transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot."

Berdasarkan definisi di atas, *moral hazard* timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakter sebagian besar entitas bisnis besar.

2.1.1.3 Pengukuran Asimetri Informasi

Dalam melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penulis menggunakan proksi *bid-ask spread.* Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2002:85) pengertian bid-ask spread adalah :

> *"Bid price is the price or which a dealer is willing to purchase a security. Ask price is the price or which a dealer is will sell a security".*

Sedangkan menurut Radclife (1997:77), pengertian bid-ask spread adalah sebagai berikut :

> *"The spread between the dealer's selling price and their buying price represents a profit to the dealer".*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Bid Pread* merupakan harga tertinggi yang ditawarkan pihak yang akan membeli. Sedangkan *Ask Price* adalah harga terendah yang ditawarkan pihak yang akan melepas atau menjual saham. Selisih dari harga Bid dan Ask disebut sebagai *Bid-Ask Spread.*

Bid-ask spread digunakan untuk mengetahui besarnya asimetri informasi yang terjadi karena asimetri infromasi berhubungan dengan penawaran dan pembelian saham yang terjadi pasar modal yang digambarkan melalui harga beli (*bid price*) dan harga jual (*ask price*).

Adapun cara mencari *bid-ask spread* ini dapat digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RBA\ I_{,t} = \frac{(HA\ I,t - HE\ i,t)}{\left\{\frac{(HA\ i,t + HE\ i,t)}{2}\right\}} \times 100$$

sumber : Scott, 2004

keterangan :

- RBA I,t = Asimetri informasi yang diproksikan dengan nilai *bid-ask spread relative* saham perusahaan I yang terjadi pada periode t.
- HA i,t = Harga *Ask* tertinggi saham perusahaan I yang terjadi pada periode t
- HB I,t = Harga *Bid* terendah saham perusahaan I yang terjadi pada periode t

Menurut Sri Sulistyanto (2008:84) Semakin tinggi nilai *Bid-Ask Spread* berarti semakin besar kesenjangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan informasi yang dimiliki oleh investor mengenai harga saham perusahaan, dan semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk merekayasa labanya.

komponen *spread* yang turut memberikan kontribusi terhadap kerugian yang dialami *dealer* ketika bertransaksi dengan pedagang terinformasi tersebut menurut Radclife (2006:45) adalah sebagai berikut :

1. Biaya pemrosesan pesanan (*order processing cost*), terdiri dari biaya yang dibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannya mempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasi untuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas guna menyelesaikan transaksi.
2. Biaya penyimpanan persediaan (*inventory holding cost*), yaitu kos yang ditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham agar dapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
3. *Adverse selection component*, menggambarkan suatu upah (*reward*) yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suatu risiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi superior. Komponen ini terkait erat dengan arus informasi di pasar modal.

Berkaitan dengan *bid-ask spread*, fokus perhatian akuntan adalah pada komponen *adverse selection* karena berhubungan dengan penyediaan informasi ke pasar modal.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Moh.Wahyudin Zarkasyi (2008:38) pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

> "Suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan".

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) Pengertian *Good Corporate Governance* adalah :

> "Suatu pola hubungan, system, dan proses yang digunakan untuk organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku".

Forum *for Corporate Governance in* Indonesia/FCGI dalam Adrian Sutedi (2011:122), *Good Corporate Governance* adalah

> "seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan".

Sesuai surat keputusan Negara BUMN No.117/2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan dan nilai-nilai etika.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan *good corporate governance* adalah suatu kebijakan dalam perusahaan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders.*

2.1.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Menteri BUMN No:Kep.117/M-MBU/2002, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), Kewajaran (*fairness*), independensi (*independency*) dan tanggung jawab (*responsibility*) (Moh. Wahyudin Zarkasy , 2008:38).

Prinsip *corporate governance* diatas digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Prinsip prinsip *good corporate governance* menurut Moh. Wahyudin Zarkasy (2008:38) adalah:

"1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)
4. Responsibilitas (*Responsibility*)
5. Independensi (*Independency*)".

Penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di atas adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*)

   Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggungjawab, wewenang dan hak kewajiban.

3. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

   Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan (*Fraud*) dan praktik-praktik *insider trading*.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

   Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam *corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Responsibilitas juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sangsi, baik sangsi hukum maupun sangsi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

5. Independensi (*Independency*)

   Masinng-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun,

dan tidak melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi oleh manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan (Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008: 38).

2.1.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Terdapat enam tujuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menurut BUMN sesuai SK. Menteri No.117/M-MBU/2002 Pasal 4, yaitu:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.1.2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dalam konteks pengendalian dikenal adanya mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme eksternal *governance* biasanya dikenal dengan istilah “mekanisme di dalam mengendalikan perusahaan”. Didalam kaitan ini kontrol melalui mekanisme pasar dilakukan oleh mekanisme pasar modal (*capital*

market), pasar produk (*product market*) serta tenaga kerja (*labour market*). Ketiga mekanisme ini berdampak pada harga saham bila kinerja manajemen dianggap tidak memuaskan harga saham akan mengalami penurunan yang pada akhirnya terjadinya permintaan berupa penggantian manajemen oleh pasar, dimana pasar yang dimaksud adalah para st*akeholder*.

Berjalannya mekanisme dengan instrumen pasar tentunya akan efektif pada kondisi pasar relatif sempurna dan efisien serta informasi yang tersedia cukup memadai. Kondisi pasar modal dinegara berkembang termasuk Indonesia, belum mempunyai karakteristik ini, sehingga diperlukan mekanisme lain sebagai alternatif. Dalam hal ini peranan mekanisme *governance* internal dapat memberikan solusi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 1995, yang merupakan kerangka penting bagi perundang-undangan mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hak dan kewajibannya, akan menghasilkan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan dan tercipta sinergi yang baik antara kepentingan pemegang saham dan manajemen.

Mekanisme *Good Corporate Governance* menurut Forum *for Corporate Governance in* Indonesia/FCGI dalam Adrian Sutedi (2011:1) adalah sebagai berikut :

1. Struktur Kepemilikan

Hal terpenting dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah bahwa setiap hak pemegang saham harus mendapat perlindungan yang pasti, dan perusahaan harus mengembangkan sistem yang memungkinkan pemegang saham menjalankan hak-haknya. Mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham adalah RUPS. Melalui RUPS, pemegang saham dapat memberikan suaranya dalam menentukan arah pengelolaan perusahaan, mendapatkan informasi material yang penting tentang perkembangan perusahaan, dan memutuskan besar keuntungan Perseroan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Pemegang saham institusional merupakan pihak yang memiliki tingkat kepemilikan besar dalam perusahaan, sehingga diharapkan dapat memonitor kinerja perusahaan dan mendeteksi adanya manajemen laba. Oleh karena itu kepemilikan saham institusional yang besar dapat memberikan pengaruh yang besar juga terhadap perusahaan. Keberadaan kepemilikan saham institusional dengan kata lain struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance*, selain perlindungan hukum bagi para pemegang saham juga berperan aktif sebagai agen pengawas (*monitoring agent*).

Menurut Beiner (2003) dalam Nurika Restuningdiah (2010:251) Kepemilikan institusional adalah jumlah presentasi hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris salah satunya komisaris independen. Komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh RUPS. Mereka diangkat untuk suatu periode tertentu, dan apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar diatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris idependen pada perusahaan maka *Good Corporate Governance* semakin bagus. Dalam penelitian ini diukur menggunakan proporsi dewan komisaris yaitu jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris keseluruhan.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang diketuai oleh presiden direktur. Dewan direksi bertugas untuk mengella perusahaan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Dewan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada seluruh pemegang saham melalui RUPS. Untuk

membantu pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, direksi dapat menggunakan jasa profesional mandiri sebagai penasihatnya. Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dari jumlah dewan direksi dalam perusahaan.

Menurut Hermalin dan Weisbach (2003), jumlah dewan direktur biasanya berkaitkan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Sebaliknya jika tidak terdapat kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur maka perusahaan akan memilih jumlah yang paling optimal. Semakin banyak dewan direktur pada perusahaan maka *Good Corporate Governance* semakin bagus.

Supaya ketiga indikator tersebut dapat dijumlahkan, maka terlebih dahulu dihitung nilai Z score masing-masing indikator setiap tahunnya, dengan mengurangkan data tiap tahun dengan rata-ratanya dan dibagi standar deviasi, (Donald R. Cooper/Pamela S. Schindler, 2006:465).

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Widjaja (2004), Manajemen laba adalah :

> "Suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang menaiki atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang".

Sedangkan menurut Healy dan Wallen dalam Sri Sulistyanto (2008:50), manajemen laba adalah :

> "Manajemen laba terjadi ketika menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan

> pemilik atau pemegang saham *(shareholders*), atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang di laporakan. Manajemen laba dapat terjadi karena diberi keleluasaan untuk memilih metode akuntansi yang akan di gunakan dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan yang privat. Selain itu prilaku manipulasi ini juga terjadi karena asimetri informasi yang tinggi antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber, dorongan, atau akses yang memadai terhadap informasi untuk memonitor manajemen. Sehingga manajemen akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan untuk kepentingannya sendiri".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan guna memaksimalkan kepentingan manajemen yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:33) ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan pihak manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu:

> "1. *Taking a Bath*
> 2. *Income Minimization*
> 3. *Income Maximization*
> 4. *Income Smoothing*
> 5. *Timing Revenue and Expense Recognition"*.

Penjelasan dari bentuk-bentuk manajemen laba diatas adalah sebagai berikut:

1. *Taking a Bath*

   Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian

direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan bila kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meski kondisi sedang tidak menguntungkan.

2. *Income Minimization*

   Cara ini hampir sama dengan *taking a bath* namun tidak ekstrim. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud mengurangi kemungkinan munculnya biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, serta pembebanan biaya riset.

3. *Income Maximization*

   Maksimalisasi laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

   Perusahaan cenderung lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Perataan laba dapat dicapai dengan suatu ketentuan yang tinggi untuk hutang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik sehingga ketentuan itu dapat dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan pada masa yang buruk.

5. *Timing Revenue and Expense Recognition*

   Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Sri Sulistyanto (2008:63) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

”1. *Bonus Scheme Hypothesis*
2. *Contracting Incentive*
3. *Political Motivation*
4. *Taxation Motivation*
5. *Incentive Chief Executive Officer* (CEO)
6. *Initial Public Offering (IPO”*.

Penjelasan dari motivasi terjadinya manajemen laba diatas adalah sebagai berikut:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*

   Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

   Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer

yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

   Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

   Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak

5. *Incentive Chief Executive Officer* (CEO)

   CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

   Perusahaan yang akan *go publik* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go publik* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikan harga saham perusahaan.

2.1.3.4 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accruals*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi.

Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2008:211) yaitu :

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*
   Model pertama merupakan model yang berbasis *Aggregate Accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discertionary accrual* sebagai proksi manajemen laba.
2. Model Berbasis *Spesific Accruals*
   Model kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*Spesific Accruals),* yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.
3. Model Berbasis *Distribution Of Earning After Management*
   Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yan*g* mempengaruhi pergerakan laba.

Friedlan (1998) mengasumsikan bahwa terdapat proporsi yang konstan antara *total accruals* dan penjualan pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah *total accruals* yang melekat dalam diskresi manajemen merupakan perbedaan antara *total accruals* pada periode yang diuji dan *total accruals* pada periode dasar yang distandardisasi dengan penjualan pada periode dasar.

Secara sistematis, *total accruals* untuk periode tes dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$TA = NI - CFO$$

TA = *total accrual*

NI = *Net income*

CFO = *Cash flow from operation*

Kemudian akan diukur *discretionary accruals* dengan menggunakan persamaan :

$$NDAC = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Sales_{it} / TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/TA_{it-1}) + \beta_4 ROA_{t-1}$$

Dimana:

NDAC = *Nondiscretionary Accrual* perusahaan

β_1 = *Estimated Intercept* perusahaan

$\beta_2, \beta_3, \beta_4$ = *Slope* untuk perusahaan

A = *Asset*

TA_{it} = *Total Accrual* pada periode tes

$Sale_{it}$ = Penjualan periode tes

ROA = Penjualan periode dasar

Selanjutnya dihitung *discretionary accrual*(DAC) dengan mengurangkan TA terhadap NDAC dengan rumus sebagai berikut :

DAC = TA - NDAC

Di dalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, pada umumnya akan ditemukan dua jenis *discretionary accruals*, yaitu *discretionary accruals* positif dan negatif Saiful (2004) yang dikutip oleh Gumanti (2001). *Discretionary accruals* positif mencerminkan manipulasi yang dilakukan manajer dengan pola *income increasing*, sedangkan negatif akan menunjukkan manipulasi *income decreasing*.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) yang mengatakan bahwa secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam melalukan dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola penaikkan laba (*income increasing*), dan nilai negative menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*)

Menurut Chan Jegadesh dan Lakonishok (2000) yang dikutip oleh Gumanti (2001) *discretionary accruals* merupakan laba abnormal yang sebagian besar disebabkan oleh *item* non kas yang mewakili laba. Sedangkan menurut Gumanti (2001) *discretionary accruals* merupakan jumlah *total accruals* yang melekat pada *discretion* (kebijakan) manajemen. *Discretionary Accruals* digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen

laba lebih ditekankan kepada keleluasaan atau kebijakan (*discretion*) yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan didalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan oleh Bernstein dan Wild (1998) yang dikutip oleh Gumanti (2001), atau dengan kata lain *discretionary accruals* merupakan *accruals* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada di bawah *disrcetion* manajemen.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mempunyai hubungan erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL	SUMBER
1	Marihot Nasution, Doddy Setiawan	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dengan manajemen laba. Komite audit mampu mengurangi manajemen laba dan berpengaruh signifikan.	Sinopsium Nasional Akuntansi X,Unhas Makasar 26-28 Juli 2008
2	Ira Novianty	Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Dan Implikasinya Terhadap Biaya Modal Ekuitas	Asimetri informasi yang diproduksi dengan volume penjualan, volatilitas return, ukuran perusahaan dan market to book value of equity secara parsial memiliki pengaruh sigbifikan terhadap praktek manajemen laba	Jurnal ekono insentif kopwil4, volume 3 Noo.1, juli 2009 ISSN :1907 – 0640,halaman 40 s.d 59

3	Rahmawati, Yacob Suparno, Nurul Qomariyah	Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta	Variabel independen asimetri informasi berpengaruh secara positif signifikan dan mampu menjelaskan variabel dependen manajemen laba	simposium nasional akuntansi 9 padang
4	Ndaruningpuri Wulandari, Widaryanti	Pengaruh asimetri informasi, manajemen laba dan indicator mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan public di indonesia	Dari keempat indicator mekanisme corporate governance, hanaya debt to equity yang secara signifikan berpengruh peositif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya variabel asimetri informasi dan manajemen laba secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	ISSN : 1907 - 6304
5	M. Awais Gulzar (corresponding author), Wuhan, P.R., Zongjun Wang, Wuhan, P.R.	Corporate Governance Characteristics and Earnings Management: Empirical Evidence from Chinese Listed Firms	Finally we can conclude that a negative relationship exists between corporate governance characteristics and earning management among all the Chinese listed firms. So in this view, by making the governance system stronger in the firm, can protect the shareholders from earning management.	International journal of accounting and financial reporting ISSN 2162 – 3082 2011 vol. 1, No. 1
6	Qiao Liu □, Zhou (Joe) Lu1	*Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective*	*We empirically show that Chinese listed companies' earnings management is significantly related to the main aspects of their corporate governance.*	*Journal of Corporate Finance* 13 (2007) 881–906
7	Luhgianto	Mencegah tindakan manajemen laba dengan mekanisme corporate govenance	Hasil penelitian menemukan bahwa mencegah tindakan manajemen laba dapat	Fokus Ekonomi Vol. 3 No. 2 desember

			dilakukan dengan mengimplementasikan mekanisme corporate governance secera efektif diperisahaan.	2008 : 32 - 43
8	Nurainun bangun & Vincent	analisis hubungan komponen good corporate governance terhadap manajemen laba dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Proporsi dewan komosaris independent berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, Jumlah komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba	Jurnal akuntansi / tahun XII, No. 03, September 2008 :289 – 302

2.2 Kerangka Pemikiran

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham, dimana manajer lebih mangetahui mengenai informasi perusahaan terutama pada laporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk kepentingan pribadi, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemegang saham, kondisi ini akan merugikan pemegang saham.

Menurut Scott (2004:8), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu sebagai berikut:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Good corporate governance adalah suatu kebijakan dalam perusahaan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders.*

Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah keerbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), independensi (*independency*) dan tanggung jawab (*responsibility*). (Moh. Wahyudin Zarkasy : 2008). Penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas manajemen laba (Chtourou at al :2001).

manajemen laba merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan guna memaksimalkan kepentingan manajemen yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Salah satu kegagalan dunia untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab adalah manajemen laba. Upaya untuk merekayasa informasi ini elah menjadi faktor yang menyebabkan laporan keuangan, tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Laporan keuangan yang seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi anatara

perusahaan dengan stakeholder menjadi kehilangan makna (Sri Sulistyanto, 2008).

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accruals*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Di dalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, pada umumnya akan ditemukan dua jenis *discretionary accruals*, yaitu *discretionary accruals* positif dan negatif Saiful (2004) yang dikutip oleh Gumanti (2001). *Discretionary accruals* positif mencerminkan manipulasi yang dilakukan manajer dengan pola *income increasing*, sedangkan negatif akan menunjukkan manipulasi *income decreasing*.

Bentuk-bentuk *discretionary accruals* tersebut disesuaikan dengan motivasi yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya apabila manajemen bermaksud untuk memaksimalkan bonus, jika ditemukan nilai *discretionary accruals* positif maka manajemen melakukan manipulasi laba dengan pola *income increasing*. Namun apabila ditemukan nilai *discretionary accruals* negatif maka hal tersebut mencerminkan bahwa manipulasi laba tidak terjadi bukan berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola *income decreasing* karena bonus yang ingin hendak dicapai oleh manajemen tergantung oleh semakin besarnya laba, bukan sebaliknya.

Menurut Chan Jegadesh dan Lakonishok (2000) yang dikutip oleh Gumanti (2001) *discretionary accruals* merupakan laba abnormal yang sebagian besar disebabkan oleh *item* non kas yang mewakili laba. Sedangkan menurut

Gumanti (2001) *discretionary accruals* merupakan jumlah *total accruals* yang melekat pada *discretion* (kebijakan) manajemen. *Discretionary Accruals* digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih ditekankan kepada keleluasaan atau kebijakan (*discretion*) yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan didalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan oleh Bernstein dan Wild (1998) yang dikutip oleh Gumanti (2001), atau dengan kata lain *discretionary accruals* merupakan *accruals* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada di bawah *disrcetion* manajemen.

2.2.1 Keterkaitan Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba

Asimetri merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer.

Terori penghubung asimetri informasi terhadap manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2008:84) adalah sebagai berikut:

> "Tingkat pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh asimetri informasi yang terjadi dipasar. Semakin tinggi asimetri informasi akan membuat tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Artinya, semakin tinggi asimetri informasi akan membuat manajer semakin seluasa untuk mengatur informasi apa saja yng harus diungkapkan, disembunyikan, ditunda, atau diubah. Upaya semacam ini disebut dengan manajemen laba".

Dalam kaitannya hubungan antara asimetri informasi dengan praktik manajemen laba sangat kuat dimana adanya asimetri informasi dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2006) pada perusahaan perbankan publik, yang berpendapat bahwa :

> "terdapat hubungan yang sistematis antara magnitut asimetri informasi dan tingkat manajemen laba yang dapat di kurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba".

Hasil penelitian Richardson (1998) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sistimatis antara magnitut asimetri informasi dan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk memanajemeni laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

2.2.2 Keterkaitan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Good corporate governance merupakan pedoman dalam tata kelola yang baik, yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan penerapan good corporate governance ini di tuangkan dalam suatu mekanisme kerja, salah satunya yaitu mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari kepemilikan saham institusional, dewan komisaris yang didalamnya termasuk komite audit yang sangat berperan dalam meminimalkan manipulasi atau tindak kecurangan didalam manajemen perusahaan. Diharapkan apabila mekanisme penerapan *good corporate governance* ini dilaksanakan secara optimal oleh pihak perusahaan dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dan

meminimalkan terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya terkait dangan rekayasa kinerja perusahaan atau praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

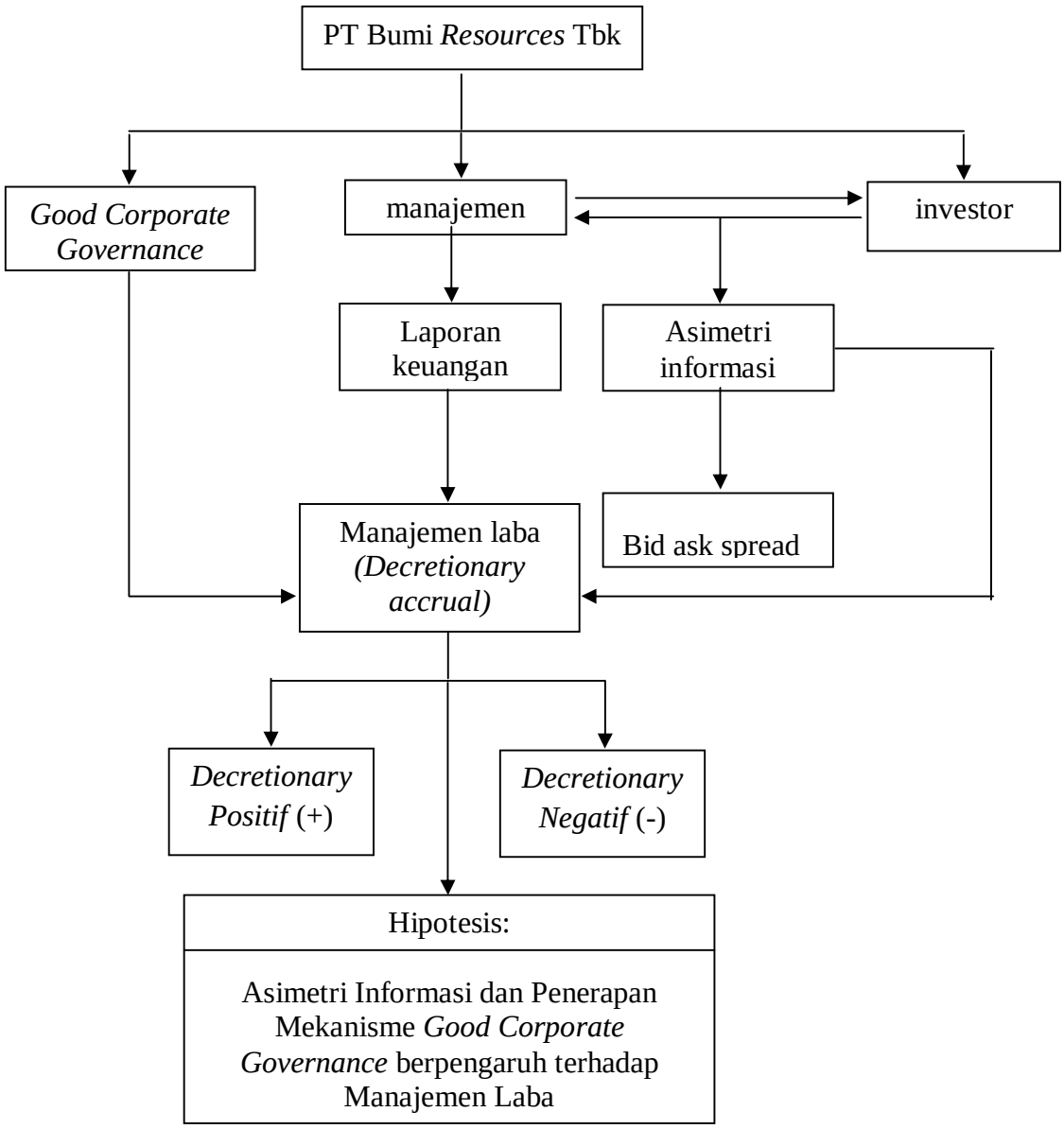
Teori penghubung *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba menurut Sri Sulistyanto (2008:154) adalah sebagai berikut:

> "Salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengeliminirkan manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua, system pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, moral hazard pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya".

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gideon SB. Boediono (2005) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Governance* dan Dampak Manajemen Laba terhadap Kualitas Laba (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) menyatakan bahwa:

> "Mekanisme *Good Corporate Governance* yang dilihat melalui persentasi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba meskipun pengaruhnya lemah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* dapat meminimalkan praktik manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas laba dalam penyajian laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan".

Berdasarkan dari uraian diatas dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2010:64) adalah sebagai berikut :

"Hipotesia merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian".

1. Hipotesis Deskriptif

Hipotesis derkriptif dari penelitian di atas yaitu :

" Asymetri informasi dan penerapan mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba"

2. Hipotesis Verifikatif

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis verifikatif penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_o = Asimetri informasi dan *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada PT.Bumi Resources Tbk.

H_1 = Asimetri informasi dan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen lama secara PT Bumi Resources Tbk. secara parsial.

H_2 = Asimetri informasi dan *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen lama PT Bumi Resources Tbk. Secara simultan.